

**DEMOKRATISASI MEDIA MASSA, RELASI KUASA NEGARA MASYARAKAT DAN
PEMILIK MEDIA
Kajian Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia**

Jamhur Poti., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang
Jamhur_poti2000@yahoo.com

ABSTRACT

Reform that took place in Indonesia in 1998, making a new milestone to the changing circumstances of the authoritarian system towards a democratic system, so that the freedom of speech and expression become more open and guaranteed by law. Apart from that there is also the transfer of power from the management of the regulatory role of the broadcasting system which has been the exclusive rights granted to a state regulatory body that is free (Independent Regulatory Body) namely; The Indonesian Broadcasting Commission to implement the management that broadcasting system which is a public space should be managed by a body that is free from interest intervention powers, certain groups and interests of owners of broadcast media itself. KPIs is one of the state institutions in the institutional system of the unitary Republic of Indonesia in accordance to Law No. 32 of 2003. In carrying out its role and powers, KPI has a relationship with other state agencies to protect the right of people in a more equitable and fair in the field of broadcasting. In the spirit of democratization is the most fundamental changes occurring in the field of broadcasting media, the broadcast media are no longer the guardians of balance (impartially) public space but become part of a mediated between the media, the state and society. In general it can be said that in a democratic system requires the interaction between the state (state), the media (industry), and with society (civil society) were very dynamic, in other words the occurrence of an interaction of the prosperity of society. The relationship between them should be harmonized, in the sense that there is a mutualistic relationship interactive complement and not dominate. However, the question is how the democratization of mass media relations of power of the state, society and media owners as well as the role of KPIs that represent civil society or civil-society, so that the media can carry out their functions freely and independently without being influenced by cooptation capitalist or industry, authorities and no more threats and conflicts will occur. KPI was originally expected to become supervisors and referees who

have integrity and no play made in gray with no power against the increasingly powerful media conglomerate cenkramanya invest in the motherland. If the case is not impossible broadcasting media face Indonesia in the future only be an agent of a product of modernity, liberalism and hidonisme.

Keyword: Democratization of the Mass Media, The Role of the Indonesian Broadcasting Commission

ABSTRAK

Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, membuat tonggak sejarah baru dengan keadaan yang berubah dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi, sehingga kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi lebih terbuka dan dijamin oleh hukum. Selain itu ada juga transfer kekuasaan dari manajemen peran regulasi dari sistem penyiaran yang telah menjadi hak eksklusif yang diberikan untuk badan pengawas negara yang bebas (BadanRegulasiIndependent) yaitu; Komisi Penyiaran Indonesia untuk melaksanakan manajemen bahwa sistem penyiaran yang merupakan ruang publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari kekuatan intervensi kepentingan, kelompok-kelompok tertentu dan kepentingan pemilik media penyiaran itu sendiri. KPI adalah salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun2003.Dalam menjalankan perannya dan kekuatan, KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya untuk melindungi hak masyarakat yang lebih merata dan adil di bidang penyiaran. Dalam semangat demokratisasi adalah perubahan yang paling mendasar yang terjadi di bidang media penyiaran, media penyiaran tidak lagi penjaga keseimbangan (memihak) ruang publik tetapi menjadi bagian dari dimediasi antara media, negara dan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem demokrasi membutuhkan interaksi antara negara (state), media, dan dengan masyarakat (civil society) yang sangat dinamis, dengan kata lain terjadinya interaksi dari kemakmuran masyarakat. Hubungan antara mereka harus diselaraskan, dalam arti bahwa ada hubungan pelengkap interaktif mutualistik dan tidak mendominasi. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana demokratisasi hubungan media massa dengankekuasaan negara, masyarakat dan pemilik media serta peran KPI yang mewakili masyarakat sipil atau masyarakat sipil, sehingga media dapat melaksanakan fungsi mereka secara bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh kooptasi kapitalis atau industri, pemerintah dan tidak ada lagi ancaman dan konflik akan terjadi. KPI awalnya diharapkan menjadi pengawas dan wasit yang memiliki integritas dan tidak bermain dibuat dalam abu-abu dengan tidak ada kekuasaan terhadap konglomerat media yang semakin kuat cenkramanya berinvestasi di tanah air. Jika kasus ini terusberlanjutbukantidak mungkin media yang broadcasting

menjadi wajah Indonesia di masa depan hanya menjadi agen produk modernitas, liberalisme dan hidonisme.

Keyword: Demokratisasi Media Massa, Peran Komisi Penyiaran Indonesia

PENDAHULUAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini bahwa terdapat dua hal yang menjadi fokus pemerhatian dalam membahas subjudul ini yaitu pendemokrasian media massa dan perananan kuasa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Peneliti ingin meneroka dan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan pendemokrasian media massa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan kuasa KPI dalam sistem media penyiaran di Indonesia.

Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998, menjadikan tonggak sejarah baru terhadap perubahan keadaan dari sistem otoriter menuju sistem yang demokratik, sehingga kemerdekaan untuk berbicara dan berekspresi menjadi lebih terbuka dan dijamin oleh perundang-undangan. Selain dari pada itu terjadi pula adanya pengalihan peranan kuasa dari pengelolaan regulasi sistem penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif negara diberikan kepada sebuah badan pengatur yang bebas (*Independent Regulatory Body*) yaitu; Komisi Penyiaran Indonesia untuk melaksanakan bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ruang publik harus dikelola oleh suatu badan yang terbebas dari intervensi kepentingan kekuasaan, kelompok tertentu dan kepentingan pemilik media penyiaran itu sendiri (Agus Ngadino, 2010).

KPI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003. Dalam melaksanakan peranan dan kuasa, KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata

dan adil dalam bidang penyiaran (Nadiah, 2009). Dengan semangat pendemokrasian ada perubahan terjadi yang paling mendasar pada bidang media penyiaran, bahwa media penyiaran tidak lagi sebagai penjaga keseimbangan (*imparsial*) ruang publik tetapi menjadi bahagian dari yang dimediasikan antara media massa, negara dan masyarakat (Henry, 2010).

Mediamassa penyiaran khususnya media penyiaran televise yang merupakan media massa yang sangat dominan dan diminati dari kehidupan masyarakat modern. Kajian yang dilakukan oleh Hendriyani, Hollander, d'Haenens dan Beentjes (2012), ke atas 589 Sekolah Dasar di Jakarta berhubung pemilihan media masa dengan hasilnya pada tabel 1.1 yaitu;

Tabel 1.1

No	Media yang Dipilih	Porsentase
1	Media Televisyen	98 %
2	Mobile Phone	90 %
3	Buku (bukan buku sekolah)	87 %
4	Video player (VCD dan DVD)	80 %
5	Radio	74 %
6	Majalah	74 %
7	Game Player	2,2%
8	Komputer	59 %
9	Internet	28 %

Sumber : dari Hendriyani, Hollander, d'Haenens, & Beentjes, (2012),

Dari hasil kajian mendapati 98 peratus responden memilih menonton siaran televisyen dengan rata-rata 5 hingga 6 jam sehari, selain dari pada itu didapati pula isi acara dari apa yang disiarkan media penyiaran televisyen tersebut banyak mengandungi adegan-adegan keganasan, seksualitas, pronografi dan mistis yang berlebihan serta tidak layak dan ramah untuk dikonsumsi bagi anak.

Penelitian dengan hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Abd Halim Bin Tanuri & Zairin Bin Ismail pada tahun 2009, terhadap 398 pelajar sekolah menengah di Sabak Berenam Selangor-Malaysia mengenai pilihan media apa yang disukai. Mengenai pendedahan mereka kepada media massa dalam sehari, secara keseluruhan responden yang dikaji telah menghabiskan sejumlah 3.62 jam menonton televisyen, 2.96 jam mendengar radio, 2.34 jam membaca suratkhbar, 2.30 jam menonton VCD/DVD, 2.21 jam membaca majalah, dan hanya 1.32 jam melayari laman web. Adapun terhadap kandungan dalam tayangan televisyen yang digemari yaitu tayangan hiburan.

Penelitian tentang efek terpaan media penyiaran televisyen pada khalayak pernah dilakukan oleh George Gerbner (1972), Huesmann & Eron (1986) dengan studi analisis yang hasilnya menemukan bahwa tayangan televisyen yang diputar pada jam-jam utama (*prime time*) mengandung 8 contoh kekerasan setiap jamnya. Penelitian tentang efek media *violence* dilakukan terhadap anak-anak yang diterpa siaran televisyen sejak berusia 8 tahun hingga 30 tahun. Metode yang digunakan yaitu panel suvey, ternyata didapati hasilnya bahwa anak-anak yang menonton acara kekerasan, keganasan yang ditayangkan televisyen pada level tertinggi saat anak-anak lebih cenderung terlibat kejahatan serius ketika dewasa (Nawiroh, 2010)

Kenyataan ini semakin dipertegas dengan kondisi dan situasi masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan dan realisasi sebuah sistem masyarakat yang disebut dengan masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang mengandalkan informasi sebagai karakteristik sosialnya sekaligus menempatkan informasi sebagai komoditas (Agner Fog, 2004). Media massa merupakan agen menyuplai informasi yang telah menjadi sahabat bagi kehidupan masyarakat di era globalisasi (Bagdikian dalam Subandy, 2000). Ketika media penyiaran masuk membawa informasi kedalam

ruang sosial maka media penyiaran tersebut perlu diatur untuk menjamin kontribusi dan sumbangannya terhadap kebaikan pada masyarakat, struktur hukum, etika dan aturan yang harus disepakati supaya media dan masyarakat sama-sama mendapatkan ruang jaminan hukum yang pasti. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai kesatuan sosial politik dan media penyiaran yang merupakan sebagai produk dari kebudayaan sosial politik masyarakat tersebut sama-sama mendapatkan nilai manfaat untuk kebaikan (Nadiyah, 2009)

Potensi media penyiaran sebagai industri besar harus diberi ruang, namun tetap mengkomoditasikan sensitive terhadap nilai-nilai etika dan budaya dalam masyarakat bagi kalangan pelaku media itu sendiri. Kerana media penyiaran mempunyai kekhasan sekaligus memiliki keistimewaan dan sistem sebarannya yang menggunakan ruang publik. Media penyiaran televisyen merupakan dinamika demokrasi modern dengan mengemban fungsi yaitu; menginformasikan (*to inform*), melakukan penelitian (*investigate*) menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan (*expose abuse*) dan memberikan pendidikan (*educate*) bagi masyarakat, memiliki peranan yang begitu besar dan begitu dahsyat dampaknya bagi kehidupan sosial dan budaya (Agus Ngadino, 2010, Henry, 2010)

Perlunya penelitian tentang pendemokrasian media massa ini kerana dalam negara yang menganut sistem demokrasi, media massa merupakan komponen yang diperlukan sebagai pengendalian sosial terhadap negara. Untuk melihat dan mengetahui demokratik atau tidaknya suatu negara tidak cukup hanya dilihat dari perubahan sistem politiknya saja, tidak sekadar sukses dalam penyelenggaraan pilihan umum dan pergantian kepemimpinan (Budiman,

2002). Namun perubahan sistem media massa juga sangat penting kerana merupakan sebahagian dari pendemokrasian tersebut. Untuk membangun masyarakat yang demokratik pula harus dilakukan upaya sistem media massa itu sendiri berubah (McChesney, 2000, Henry, 2010).

Hal tersebut kerana pendemokrasian mensyaratkan adanya unsur kebebasan dalam sistem media massa, namun kecenderungan media massa di Indonesia belum demokratik dan masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan budaya. Hal ini menyebabkan akhirnya tujuan dan fungsi media massa yang asal bertukar menjadi bias dan menjadi industri media massa global, memperlihatkan perkembangan dimana terjadinya kapitalisasi dan industrialisasi media massa yang dikuasai oleh pemilik modal hanya oleh sekelompok dan beberapa pelaku industri itu saja (Raboy, 2004, Agus Ngadino, 2010).

Pendemokrasian merupakan tema dan isipokok perubahan dunia saat ini, di dalamnya terdapatberbahagaipersoalan yang saling terkait satu sama lain (*inherent*), mengenai kebebasan yang antaranya seperti hak-hak masyarakat sipil, hak-hak masyarakat dalam perbedaan dan keberbagaian, pendekatan nilai dan kelestarian budaya. Pendemokrasian pada dasarnya merupakan suatu konsep politik, akan tetapi pendemokrasian dapat diamalkan pula dalam perspektif dan pengertian yang melekat dan saling menyokong dengan sistem ekonomi, sosial dan budaya. Oleh kerana itu pendemokrasian tidak dapat di generalisir, kerana konsep demokrasi negara yang satu akan sangat berbeza dengan konsep demokrasi negara lainnya (A.Giddens, 2001, MP. Butarbutar, 2015).

Menurut Dahlgren (2002), McCornell dan Becker (2000), tanda yang paling jelas dari suatu rejim yang tidak demokratis adalah penghalangan dan pelarangan terhadap hak-hak masyarakat yang asasi, seperti hak melahirkan

pendapat dan berkomunikasi. Sekiranya gagasan dan ide-ide mengalir secara bebas tetapi masih dalam kekangan, maka tidak akan ada informasi yang benar dan terpercaya. Begitu pula jika media massa sebagai ruang publik tersebut terbuka dan bebas tetapi tidak ada partisipasi, ide dan gagasan masyarakat, maka demokrasi akan dapat terkikis sebagaimana halnya demokrasi itu akan musnah ketika hak-hak masyarakat yang asasi tersebut dikekang dan dilarang (Restiana, 2008)

Sedangkan konsep media massa akan sangat bergantung pada konsep demokrasi dan sistem politik dimana media massa itu beroperasi. Dalam sistem negara komunis atau sistem negara otoriter kebebasan media massa dikembangkan untuk membina pendapat masyarakat yang menyokong penguasa, media massa cenderung dimanfaatkan sebagai corong pemerintah berdasarkan sistem tersebut. Sedangkan dalam konsep negara yang menganut sistem demokrasi atau sistem liberal, kebebasan media massa pada dasarnya diarahkan bagi pencerahan menuju masyarakat yang terbuka, kreatif, dan informatif. Dalam konsep negara yang demokratis kebebasan media massa akan informasi sangat diperlukan agar masyarakat menjadi cerdas, dapat memahami hak-hak demokrasinya dan mengetahui akan kebenaran atas fakta sosial. Hanya dengan kebebasan media massa yang mandiri, akan terwujud pula keberagaman akan kebenaran informasi yang dapat menjadikan masyarakat untuk lebih berkembang, bersikap, berpikir terbuka dan saling menghargai (Dominick, 1990, Siregar.A, 2000, Waluyo, 2011).

Ketika media massa yang digerakkan dengan penuh kesadaran sosial akan mampu membawa manfaat bagi masyarakat dan negara, namun media massa yang bertujuan dengannya untuk mencari laba dan keuntungan semata (*profit oriented*) tanpa memikirkan kerusakan akhlak, akan menyumbang

kepada pelbagai permasalahan sosial (Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Nik Yusri Musa, 2009, Eka Putra, 2015). Perkembangan pendemokrasian media massa di Indonesia pasca reformasi 1998 begitu bebas dan terbuka. Menurut *Reporters Sans Frontiers* (RSF), lembaga yang berbasis di Paris, Prancis dan *Freedom House*, organisasi non-pemerintah yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Keduanya memiliki pendekatan yang sangat mirip dalam menilai indeks kebebasan media dan pers sebuah negara, yaitu dengan melihat dari tiga aspek penting yaitu: hukum, politik, dan ekonomi. Mendapati bahwa kebebasan media dan pers Indonesia di mata RSF pada tahun 2013, berada pada urutan membaik menjadi 139. Dengan posisi tersebut Indonesia juga memiliki urutan yang lebih bagus dibanding kolega Asia-nya, seperti Malaysia (145, skor 42,73), Filipina (147, skor 43,11), Singapura (149, skor 43,43), dan Myanmar (151, skor 44,71). Namun dengan perbaikan peringkat ini, Indonesia masih kalah dari provinsi ke-27 yang sebelum terjadi referendum merupakan bahagian dari negara Indonesia yaitu: Timor Timur berada pada peringkat (90, skor 28,72). <http://freedomhouse.org> tanggal 5 April 2014.

Hal serupa mengenai pendemokrasian media massa di Indonesia mendapat tanggapan yang positif juga dari Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Ahmad Shabery Cheek pada Simposium Hari Pers Nasional pada tanggal 8 Pebruari 2015 bertempat di Batam - Indonesia, mengakui bahwa media massa dan pers di Indonesia lebih bebas dan terbuka dibanding di negara Malaysia karena telah melalui proses tersendiri sehingga memiliki nuansa yang dinamis. Media massa Indonesia berada dalam alam yang benar-benar bebas sehingga tidak ada yang bisa mengontrol dan masing-masing berdiri sendiri. Segala perbincangan dan diskusi juga telah dilakukan secara mendalam. Malaysia akan belajar melalui proses alam media massa yang lebih liberal tersebut. Akan tetapi di negara Malaysia itu sendiri ada kekangan

kerana masyarakatnya yang terdiri dari berbagai kaum, sukubangsa yang punya sensitifitas tersendiri. <http://antaranews.com> tanggal 20 Pebruari 2015.

Meskipun demikian kebebasan media massadi Indonesia tersebut bukan tanpa kekhawatiran, terutama adanya kritikan-kritikan yang datang dari pihak pemerintah dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan kapitalis. Kritik-kritikan itu sangat bervariasi ada yang menyoroti kelemahan-kelemahan dalam isi pemberitaan yang dianggap kurang berimbang (*balance*) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemilik modal, sehingga menggeser tujuan asas media massasebagai medium informasi, edukasi, dan sebagai *social control*. Begitu pula dengan isu tentang kepemilikan media massa yang terpusat kepada kelompok dan pemilik modal tertentu dimana semakin membesarnya perusahaan media massa bukan semata-mata perkembangan bagus untuk bisnis, tapi memiliki dampak yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat, karena industri media massa penyiaran berbeda dengan industri manufaktur atau industri jasa lainnya, media massa penyiaran mengandung unsur nilai, pendapat tertentu, informasi tertentu, dan lain sebagainya, yang bisa membawa masyarakat terpengaruh atas isi dan kandungan media massa tersebut (Rita Gani, 2007, Satrio, 2011)

Apa jadinya jika isi media massa penyiarantersebut dikonsumsi dan dipenuhi dengan informasi yang dapat menyesatkan (*misleading*), yaitu yang mengabaikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesungguhnya, cenderung menyajikan hiburan-hiburan yang tidak sehat bagi masyarakat, informasi yang tidak mengandung pendidikan yang berguna bagi masyarakat, sedangkan bahwa apa isi yang disampaikan oleh industri media massa penyiaran tersebut sebahagian yang akan membentuk isi, pikiran dan tindakan masyarakat sebagai konsumennya (Bungin, 2008, Ignatius, 2008)

Dibalik kekhawatiran dan ketakutan atas dampak mediamassa yang global

tersebut dan usaha untuk melindungi masyarakat dari dampak media massadengan berbagai perundang-undangan dan peraturan yang dapat memperkecil ruang ekspansi industri media massa penyiaran, sekaligus diperlukan penyediaan mekanisme kawalan kontrol terhadap isi tanyangan dari media massa penyiaran yang tidak sehat untuk dikonsumsi tersebut. Disamping itu bagaimana agar media massa juga dapat menjalankan peranannya sesuai dengan konsep demokrasi tanpa ada hegemoni dari kekuasaan negara dan kepentingan kapitalis, diperlukan adanya partisipasi dan gerakan masyarakat sipil, lembaga yang bebas sesuai dengan konsep *civil-society*, yang sejalan dan memiliki kesamaan dengan konsep demokrasi yang selama ini selalu diabaikan dan tidak pernah diperhitungkan, konsep gerakan masyarakat sipil atau *civil society* tersebut merupakan sebagai kekuatan diluar dari struktur negara yang dapat dijadikan sebagai penetrasian dan ketahanan dari efek dan terpaan pengaruh liberalisme dan budaya global (Huntington & Harrison 2006:44,, Siregar, A, 2000, Restiana, 2008).

Menurut (Hoang Thi Minh, 2002), konsep *civil society* dapat dilihat dari gerakan masyarakat sipil, non pemerintahan dan organisasi masyarakat, organisasi independen, kelompok hak azasi manusia, lembaga keagamaan, kelompok penegak demokrasi, organisasi aktivis lingkungan hidup, organisasi media serta lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap permasalahan sosio-kultural.

Hal ini dibenarkan oleh (Kitley, 2003). Bahwa negara semisal Korea, Thailand dan Indonesia terdapat masyarakat sipil atau *civil society* yang memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan media massa dan kepentingan politik. Dalam konteks gerakan masyarakat sipil atau *civil society* ini juga urgensi pembentukan model regulasi sistem media penyiaran yang demokratik

bertumpu pada kewajiban memberikan keberagaman kepemilikan dan keberagaman dalam konten dapat tetap terjaga ke arah yang lebih baik.

Oleh kerana itu dukungan dan konsensus atau atas kehendak bersama dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap pendemokrasian sangat menentukan keberhasilan proses demokratik dan untuk keluar dari sistem otoritarianisme tersebut. Kerana demokrasi diharapkan dapat mengurangkan atau bahkan sebagai resolusi konflik, dalam lingkungan yang demokratis dimana masyarakat sipil berkembang dan berhubungan dengan masyarakat yang pluralis, konflik kekerasan dapat berkurang dikarenakan konflik-konflik yang terjadi dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara kebersamaan yang lebih menekankan kepada dialog-dialog dan komunikasi (Sugeng, 2010).

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem demokratik dibutuhkan pola hubungan interaksi antara negara (*state*), media massa (*industry*), dan dengan masyarakat (*civil society*) yang sangat dinamik, dengan kata lain terjadinya suatu interaksi untuk kemakmuran bagi masyarakat. Hubungan di antara ketiganya harus tetap harmonis, dalam arti terdapat hubungan mutualistik yang interaktif saling mengisi dan tidak mendominasi (Rita Gani, 2007)

Dengan demikian berbagai keputusan yang diambil negara dan penguasa secara prinsip merupakan perkongsian antara tuntutan masyarakat sipil dan kepentingan-kepentingan bersama dari pihak pemerintah dan penguasa itu sendiri. Namun demikian pertanyaannya adalah bagaimanapendemokrasian media mssa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan KPI yang merupakan representasi masyarakat sipil atau *civil-society*, agar media massa dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dan mandiri tanpa diwarnai oleh kooptasi kapitalis atau industri, penguasa serta tidak ada lagi

ancaman dan konflik-konflik yang akan terjadi.

Selain itu pertanyaan juga muncul apakah KPI sebagai lembaga negara yang bebas dapat menjalankan Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 yang mengamankan bahwa sistem penyiaran Indonesia harus menjadi sistem penyiaran yang demokratis dan desentralistik. Sebab dalam sistem penyiaran Indonesia yang baru menjamin adanya prinsip *diversity of ownership and diversity of content*.

Selanjutnya, pemusatan kepemilikan dibatasi dengan sangat ketat, namun lembaga-lembaga penyiaran sekarang ini tidak demikian. Malah sebaliknya justru telah terjadi pemusatan kepemilikan dalam lembaga penyiaran, sehingga otoritarianisme - sentralistik yang dilakukan oleh negara sebelumnya, sekarang bergeser ke arah otoritarianisme swasta atau korporasi. Padahal otoritarianisme-sentralistik siapapun pelakunya akan membahayakan pendemokrasian. Ini karena otoritarianismesentralistik akan memunculkan monopoli, yang pada akhirnya akan mengancam keberagaman (*diversity*), baik *diversity of ownership* maupun *diversity of content*. Ini jelas bertentangan dengan paradigma penyelenggaraan penyiaran yang tidak sesuai dengan asasdemokratik (Stiftung, F.E, 2008)

Sesungguhnya secara umum ancaman dan konflik bagi kebebasan media massaberasal dari dua sumber utama yaitu pemerintah dan industri media. Pertama ancaman yang bersumber dari pemegang kuasa negara, pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan dan keterbukaan, terutama kebebasan untuk akses informasi, manakala yang keduanya, berasal dari apa yang disebut John Stuart Mill sebagai "*tyranny of the majority*" yaitu ancaman yang wujud dalam industri media itu sendiri yaitu pemilik modal(Bealey, 2000).

URAIAN MASALAH

Dari huraian diatas, penelitian ingin menjelaskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini tentang pendemokrasian media massa, relasi kekuasaan negara, masyarakat dan pemilik media serta peranan kuasa KPI dalam sistem penyiaran di Indonesia yaitu:

1. Pada era pendemokrasian media massa menjadikan kondisi dunia yang tanpa batas (*borderless world*). Senario tersebut mengakibatkan terjadinya penyeragaman secara global. Ketika liberalisasi dan globalisasi memicu penyeragaman sistem dalam bentuk *trendnasionisme*, *multikulturalisme* kebudayaan, maka terjadi pengelompokan dengan tujuan masing-masing individualis. Informasi globalisasi media massa tidak selamanya dapat menyumbangkan bagi kebaikan, kerana informasi globalisasi media massa sempat menjadi bibit-bibit tumbuhnya perilaku kekekarasan, konflik atau regionalisme yang berlebihan.

Kesan globalisasi media massa yang bersifat tanpa batasa berdampak kepada isu-isu kedaulatan negara, masyarakat dan individu. Berarti bahwa dampak negatif dari globalisasi media massa tidak hanya berhenti pada peringkat sosial-kolektif tapi juga pada peringkat individual. Misalnya, bagaimana hak pribadi dapat dilindungi ketika hak tersebut mempengaruhi dengan hak publik untuk mengetahui (Mulkan, 2007)

2. Perkembangan globalisasi membawadua agenda yaitu liberal dan kapitalis, kedua agenda tersebut saling berbenturan kepentingan. Agenda pemilik modal dalam konteks industri media massa lebih mendapat perhatian dan menjadikan kepentingan utama, sementara kepentingan publik sering diabaikan dan tertinggalkan. Memang media massa global menjadi salah satu tolok

ukur bagaimana demokrasi harus dibangun, namun globalisasi yang diertikan dan dimaklumi dalam konteks perspektif ekonomi dan politik tetap harus diletakan dalam tatanan memproduksi dan mengkonsumsi seluruh produk media massa sebagai output kebudayaan sosial, artinya dengan konteks Indonesia apakah memang globalisasi media massa dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung atau hanya globalisasi media massa merupakan retorika dan euforia pendemokrasian disuatu negara, dengan liberalisasi industri media massa menjadi semakin bebas dari kontrol penguasa namun semakin kuat terhadap tekanan dan kepentingan dari kapitalis (Siregar, A, 2000, Mulkan, 2007)

3. Munculnya masalah tuntutan jangkauan wilayah siar (*extensive range*) merupakan bahagian dari pemerataan dan keadilan terhadap akses informasi, semestinya tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh arus informasi (*blank spot area*), kondisi ini memungkinkan media massa global masuk ke suatu negara, tentu saja standarisasi teknologi perangkat dan infrastruktur akan menjadi ukuran yang harus disesuaikan dengan standarisasi internasional, kondisi ini membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit. Persoalannya adalah letak geografis wilayah Indonesia, terdiri dari laut dan daratan merupakan pulau-pulau terdepan masih terdapat wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan kurang dari segi nilai bisnis (Rahmattie, 2007)
4. Pendemokrasian media massa dapat pula memunculkan masalah tentang aspek keberagaman, kepemilikan dan sumber daya manusia yang menjadi pelaku media massa. Ketika media massa global masuk kedalam suatu negara, tentu saja standarisasi sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Persoalannya adalah ketika masalah sumber daya manusia (SDM) muncul sebagai isu

masalah global dapat dijangka bagaimana kualitas isi pemberitaan, ketika kualitas isi media massa lokal masih memprihatinkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia media massa lokal dapat dipercaya kualitasnya dan sejajar dengan sumber daya manusia media massa global yang sudah diketahui kualitasnya (Rahmiati, 2007, Mulkan, 2007)

5. Globalisasi media massa yang semakin menuntut adanya kesetaraan atau persamaan identitas lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah, tidak ada lagi jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, begitu juga antara daerah maju dengan yang daerah terkebelakang.

Kehadiran suatu media massa dapat menjadi indikator yang kuat terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran media massa global menimbulkan masalah, seperti pada pembentukan pada karakter, nilai-nilai etika dan moral. Inilah yang pada akhirnya akan membuat kepincangan yang didominasi oleh media massa global. Sehingga identitas budaya lokal semakin tergedasi dan tenggelam (Siregar, 2007, Mulkan, 2007)

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dipaparkan jelaslah bahwa masalah pendemokrasian media massa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media dengan fokus kajian mengenai peranan dalam kewenangan KPI untuk mengatur dan menata sistem media penyiaran yang demokratik, yang memiliki dua semangat utama tentang penyiaran dengan soal-an kajian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu;

Soal-an kajian satu mempersoalkan aspek regulasi yaitu; legalitas, infrastruktur, sumber daya manusia dan kepemilikan (*diversity of ownership*)

yang berhubungan dengan media massa global, media massa *mainstream* yang bersiaran tingkat nasional mahupun tingkat local.

Sedangkan soalan kajian yang kedua mempersoalkan dari aspek keberagaman program siaran (*Diversity of Content*) yaitu; pengawasan isi dan kandungan siaran dari dampak masalah penyiaran media yang bebas dan global, kearifan lokal sebagai indentiti bagi penyiaran baik yang bersiaran melalui siaran berjaringan di pusat mahupun di daerah di Indonesia.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai ilmu dan maklumat berhubungan dengan pendemokrasian media massa, yaitu mengenai teori dan model kebebasan media massa penyiaran di Indonesia. Fenomena kebebasan media massa ini mesti dilihat dari keseluruhannya, dalam erti kebebasan media massa tanpa batasan dalam kaitannya dengan nilai-nilai kultur, sosial, politik dan ekonomi serta semua persoalan dalam negara tidak dapat dikesampingkan.

Dalam teori media massa yang liberal, media massa bukan sebagai instrument negara, akan tetapi merupakan sebagai *free market ide* bagi masyarakat dalam menyalurkan hak konstitusinya. Sejatinya media massa mesti bebas dari kekangan negara dan pemilik media dalam menyebarkan informasi. Media massa yang liberal tidak semata dijadikan sebagai *profit oriented* namun memiliki tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tujuan dimana media massa itu berada. Sehingga pendemokrasian sistem media massa yang berlangsung dapat menjadikan masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera, adil dan memiliki peradaban.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, hasil kajian ini akan memberikan manfaat pula secara praktikal bagi KPI dalam melakukan penataan sistem media penyiaran dan dalam mengatasi terpaan sistem media yang bebas global mengarahkan pada sistem liberal. Selain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan bagi relasi kuasa pemerintahan, masyarakat dan pemilik media penyiaran tidak terjadi adanya hegemoni. Dengan harapan kajian ini akan menjadi rujukan serta pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan sesuatu aktiviti dibidang penyiaran. Selain dari pada itu, manfaat lain hasil penelitian dapat diamalkan sebagai data yang berharga bagi penelitian selanjutnya atau sejenis dalam bidang ilmu komunikasi dan media massa penyiaran di Indoensia.

BATASAN PENELITIAN

Mengacu pada masalah yang telah diuraikan, masalah penelitian menekankan pada fenomena pendemokrasian media massa, relasi kuasa negara dan pemilik media serta fokus kajian tentang peranan KPI dalam sistem penyiaran. Penelitian memilih media penyiaran di Indonesia. Dalam kajian ini penelitian akan membincangkan tentang penpendemokrasian media massa. Untuk kajian ini penelitian mambatasi media massa hanya pada media penyiaransaja.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Sistem Normatif Media Massa

Sebagai fokus kajian ini adalah tentang kebebasan, maka untuk mengkaji tentang kebebasan media massa pada penelitian ini dapat digunakan dengan pendekatan teori sistem normatif media massa Mc.Quail, (1987). Kerana

selama ini belum ada teori yang khusus mengkaji tentang pendemokrasian sistem media massa. (Kurniati, 2006). Dengan pendekatan teori sistem normatif media massa tersebut dianggap tepat untuk menggambarkan isu-isu yang saling keterkaitan antara sistem media massa dengan sistem sosial, ekonomi dan politik serta sistem budaya yang ada pada suatu institusi masyarakat dimana media itu berada. Teori normatif media menerapkan 4 pola kategori sistem media massa, untuk menguji teori normatif media massa dapat dibandingkan dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan media massa atau pers dalam suatu negara. Dengan demikian dari literatur ilmu komunikasi teori normatif media massa merupakan hasil pengamatan dengan menggunakan metode ilmu sosial oleh S.Siebert, Theodore Peterson & Wilbur Schramm (1986), yang dituangkan dalam bukunya *'Fours Theori of the Pers'* (Severind-Tankard, 2005, Kurniati, 2006, Waluyo, 2011) yaitu;

a. Sistem Teori Media Massa Otoriter

Teori media massa otoriter ini lazim diterapkan dalam masyarakat pra demokratik dan dalam masyarakat yang masih didominasi kekuatan otoriter. Prinsip umum dari teori sistem media massa otoriter antara lain, 1). media massa tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kewenangan penguasa yang berlaku, 2). media massa harus tunduk dan taat pada pemegang otoritas kekuasaan, 3). media massa harus menghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politik dari kalangan dominan atau mayoritas, 4). Sensorship diperbolehkan untuk menegakkan prinsi-prinsip aturan yang dianut, 5). Kecaman terhadap pemegang kekuasaan otoritas tidak dibenarkan, 6). Kalangan pekerja media massa dan wartawan tidak memiliki independensi dalam organisasi medianya. Sesungguhnya pada teori otoriterian ini media massa hanyalah "korban" kerana berada dalam ruang publik yang tidak menghormati kebenaran dari kenyataan sosial. Sementara kebenaran

itu hanya boleh datang dari kekuasaan negara (Siregar.A, 2000)

b. Teori Sistem Media Massa Liberatarian,

Teori sistem media massa liberatarian muncul pada abad ke 17 sebagai reaksi atas berlakunya kontrol dan kekangan penguasa terhadap media massa., teori ini diterapkan diberbagai negara di dunia yang menganut sistem demokratik liberal. Beberapa prinsip dari teori ini adalah, 1). Tidak adak sensorship terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, 2). Setiap individu bebas memiliki media massa dan tidak perlu ada izin atau lisensi, 3). Kritikan dan kecaman terhadap otoritas penguasa massa tidak boleh di kekang apalagi penjarakan, 4). Pekerja media massa dan wartawan memiliki hak otonomi professional yang kuat dalam organisasi medianya.

c. Teori Sistem Media Massa Tanggungjawab Sosial,

Teori media massa bertanggungjawab sosial diterjemahkan atas dasar asumsi bahwa prinsip-prinsip pers liberatarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam media masa yang bebas para pemilik dan para pengelola media massa yang terutama menentukan fakat-fakta apa saja yang bisa disiarkan kepada publik sebagai fungsi *gatekeeper* dan *framing*. Teori media massa bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dengan tanggungjawab sosial. Teori ini disadari atas pertimbangan bahwa sistem pada pasar bebas, kenyataannya tidak dapat untuk memenuhi tujuan dari kebebasan media massa dan tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat banyak. Prinsip-prinsip utamanya,1) media massa harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada mayarakat, 2) media massa harus bebas dalam melaksanakan tugasnya, 3). Media massa mesti bersifat pluralistis dan merefleksikan keberagaman masyarakat, memberikan kesempatan yang sama utnuk

mengepreksikan berbagai sudut pandang dan gagasan serta memberikan hak jawab. 4). masyarakat mempunyai hak untuk menuntut standar kinerja dan profesionalitas dari media massa, kerananya media massa merupakan *public goal*, wartawan dan kalangan media massa bertanggungjawab terhadap masyarakat, terhadap pasar dan terhadap pemilik modal.

d. Teori Sistem Media Massa Soviet

Teori sistem media massa Soviet memiliki prinsip utamanya yaitu, 1) media massa merupakan kepanjangan dan corong dari otoritas penguasa, b) individu dan kalangan swasta tidak dibenarkan untuk memiliki media massa, 3) media massa harus memberikan pemikiran yang lengkap dan objektif mengenai masyarakat dan dunia sesuai dengan ajaran Marxisme dan Leninisme, 4) masyarakat berhak melakukan sensorship dan memberikan hukuman dalam upaya mencegah pemberitaan yang sifatnya anti sosial.

Selain dari 4 teori yang sudah dipaparkan diatas, guna untuk lebih menyokong terhadap penelitian ini, penelitian juga menambahkan 2 teori media massa sebagaimana menurut Denis McQuail (1991) yaitu;

2. Teori Sistem Media Massa Pembangunan

Teori sistem media massa pembangunan ini muncul pada tahun 60-an dan menjadi model di banyak negara berkembang, yaitu; Asia, Afrika dan Amerika latin. Dari beberapa prinsip utamanya, 1) media massa harus menginformasikan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, 2) kebebasan media massa dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat negara berkembang, 3) isi media massa memprioritaskan kebudayaan dan bahasa nasional, dan informasi tentang negara-negara tetanga, 4) wartawan memiliki tanggungjawab dan kebebasan

dalam menjalankan tugasnya, 5) demi kepentingan negara diberikan untuk ikut campur tangan, memberikan pembatasan, dan pengoperasian media massa melakukan penyensoran, memberikan subsidi dan pengendalian secara langsung.

Teori media massa pembangunan ini diselaraskan dengan pembangunan dunia ketiga yang tidak memiliki sistem komunikasi yang sudah maju. Unsur positif dari teori media massa pembangunan bahwa media massa harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional, untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional.

3. Teori Sistem Media Massa Demokratik Partisipasi.

Teori sistem media massa demokratik partisipasi muncul belakangan dan diterapkan di negara-negara berkembang yang menganut paham liberal yang sudah maju. Prinsip utamanya, 1) setiap orang berhak untuk mendapatkan akses terhadap media massa dan berhak untuk dilayani, 2) eksistensi media massa ditujukan untuk kepentingan khalayak dan bukan untuk golongan tertentu, 3) media massa tidak tunduk pada penguasam 4) setiap orang, kelompok bebas untuk memiliki media massa, 5) kebutuhan sosial tertentu yang terkait dengan media massa tidak cukup dikemukakan melalui tuntutan konsumen secara individual, ataupun melalui negara dan berbagai sasaran utama kelembagaan. Teori ini lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopoli media massa yang dimiliki oleh pihak swasta atau *private*. Inti dari teori partisipasi demokratik ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan aspirasi pihak penerima komunikasi dalam masyarakat politis. Teori ini menyukai adanya keberagaman, skala kecil, lokalitas, kesederajatan dan interaksi dalam masyarakat. Kemudian penelitian juga menambahkan 3 teori sistem media massa yang memiliki kaitan dan irisan dengan teori-teori sebelumnya pada dasarnya saling menopang, guna untuk

lebih memperkaya dan memperkuat teori mengenai penelitian ini. Menurut Altschull (McQuail, 1991, Waluyo, 2011) ada 3 konsep dasar teori normatif yang lebih sederhana dalam sistem media massa, yaitu;

1. Sistem Pasar, yang dikaitkan dengan dunia pertama yaitu kapitalis dan liberal. Pandangan teori pasar terhadap kebebasan sangatlah berbeda, terutama dalam hal difenisi kebebasan yang mengandung makna negatif, tidak adanya kontrol atau kebijakan negara.
2. Sistem Marxis, yang dikaitkan dengan dunia kedua, yaitu sosialis-soviet. Teori media marxis ini secara umum sejalan dengan teori otoriterian yang digunakan pada tahun 1960 sampai tahun 1980. Di Eropa pendekatan marxisme terhadap media massa dan budaya sering disebut dengan pendekatan *cultural studies*, meskipun pengaruhnya tidak dominan namun masih tetap tersebar luas. Marxisme memiliki erti berbagai makna, ada yang mengatakan marxisme adalah *critical*, ada juga yang memaknai *radical*. Secara umum dapat dikatakan pendekatan Marxisme terhadap pengaruh media massa bergantung pada pengertian dan mengkaitkan dengan ideologi. Dalam literatur marxisme, istilah ideologi secara umum bermakna negatif, merujuk pada ideologi dominan yang mendukung kepentingan kelas dominan dan dijadikan alat untuk mempertahankan status quo (Zulfebriges 2003)

Teori Marxisme menekan pada peran media massa yang cenderung mempertahankan status quo, kontras sekali dengan teori media massa liberal pluralis yang menekan pada media massa yang memiliki kebebasan berbicara. Munculnya Neomarxisme dalam ilmu sosial sendiri merupakan reaksi terhadap model fungsionalisme tentang masyarakat. Fungsionalisme menurut Veeger (185:96) menyoroti tentang struktur-struktur dan gejala sosial dari segi konsekuensi terhadap kehidupan bersama. Model fungsionalisme menggambarkan

lembaga sosial sebagai fungsi kohesif dalam sebuah sistem sosial budaya yang saling berhubungan. Model ini tidak memperhitungkan konflik-konflik yang akan terjadi dalam masyarakat (Zulfebriges, 2003).

Teori Marxisme memandang masyarakat sebagai suatu dominasi kelas, media massa adalah bahagian dari arena pertarungan ideologi, meskipun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Media massa semakin dikendalikan dan terfokus dalam monopoli kapital. Media massa selain melakukan fungsi informatif dan hiburan, juga melakukan fungsi pengukuhan norma-norma sosial serta memberikan penganugerahan status. Karena media massa memiliki beberapa fungsi yang sangat vital, dengan demikian timbul kekhawatiran masyarakat bahwa media massa berpotensi untuk memanipulasi orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Media massa juga bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kepentingan untuk menjamin ketundukan dan kepatuhan masyarakat pada status quo sosial dan ekonomi yang akhirnya akan membungkam kritikan sosial dan kemampuan khalayak untuk berpikir positif dan kritis (Wright, 1985, Zulfebriges, 2003)

Menurut sistem teori Marxis media massa dapat dijadikan sebagai alat, yaitu:

1. Media massa digunakan sebagai alat produksi, media massa merupakan suatu cara produksi yang dalam masyarakat kapitalis merupakan milik kelas penguasa. Menurut Marxis Klasik media massa menyebarkan gagasan dan pandangan dunia kelas penguasa dan menolak gagasan-gagasan yang berbeda dan alternatif. Media massa berfungsi untuk menghasilkan *false conscious* (kesadaran palsu) pada kelas pekerja atau buruh. Produk-produk yang diproduksi oleh media massa merupakan cerminan dari nilai-nilai penguasa yang mengabaikan nilai-nilai dari keberagaman.

2. Media massa dan Idiologi, fungsi utama dari teori Marxist adalah “*materialist*” yang menentukan kesadaran makhluk sosial, sesuai pandangan Marxist posisi idiologi adalah fungsi dari posisi kelas dan idiologi dominan dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan pandangan idealis yang menekan pada kesadaran bersama.
3. Sistem media massa berkembang, yang dikaitkan dengan dunia ketiga, yaitu negara-negara yang sedang berkembang. Teori media massa berkembang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu perhatiannya dalam upaya mempersatukan rakyat, bukan tujuan untuk memecah belah masyarakat. Teori tentang kebebasan media massa ini dapat memaparkan asumsinya bahwa ada hubung kaitanya antara sistem sosial budaya, struktur politik dan struktur ekonomi dengan sistem media massa yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya pada masyarakat yang struktur politiknya bersifat liberal, akan mewarnai perilaku sosial dan ekonominya yang liberal. Untuk itu dapat diamati, media massa yang dapat eksis dan diterima oleh masyarakat tersebut harus memiliki karakteristik yang liberal pula.

Demikian pula halnya dengan sistem media massa yang diwujudkan dalam materi kandungan penyajian, struktur dan fungsi pada sebuah media massa tertentu akan mendorong atau mendukung perwujudan dari sistem sosial budaya sebuah tatanan masyarakat, seperti pada pergeserannya nilai dan norma budaya yang dipengaruhi oleh kandungan tayangan media yang intens. Perpaduan antara sistem sosial dan sistem media massa, mempengaruhi dorongan-dorongan psikologis, kategori sosial dan hubungan sosial dari audiens penerima media tersebut. Dalam hal ini media massa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis seperti aktualisasi diri, menyalurkan minat dan hobi serta dorongan-dorongan psikis audiensnya, sehingga baik penggunaan media massa maupun penggunaan saluran informasi non media

sama-sama saling terkait untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik pada tingkat kognisi, afeksi maupun perilaku audiens.

4. Teori Huntington

Sebagai kerangka kajian tentang pendemokrasian Huntington (1995) merumuskan hasil penelitiannya tentang kemungkinan penerapan sistem demokratik disuatu negara-negara dunia ketiga, setelah banyaknya negara-negara demokratik yang tumbang di negara-negara tersebut, Huntington membedakan pembangunan demokratik dari 2 (dua) macam kondisi yaitu:

- 1) Pra-demokrasian yang diperlukan untuk pembangunan demokratik;
- 2) Proses politik yang diperlukan untuk pembangunan demokratik.

Untuk menuju proses demokratik pada suatu negara diperlukan beberapa faktor selain faktor kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan, terdapat faktor struktur sosial, lingkungan eksternal dan konteks budaya, sebagaimana dijelaskan yaitu:

Pertama, semakin makmur suatu negara dari segi ekonomi, semakin memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi negara demokratik, dapat dikatakan apabila suatu kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat taraf hidup yang makmur, maka kelompok masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang paham terhadap demokratik. *Kedua*, jika tersedia struktur sosial yang artikulatif dan tersebar merata secara luas serta tersedia berbagai kelompok secara relatif otonom (kelompok usahawan, profesi, agama, etnis), maka kelompok-kelompok ini akan mendorong timbulnya asas-asas yang diperlukan untuk mengendalikan kekuasaan negara dan membangun prasarana dasar yang diperlukan untuk tumbuhnya pranata demokratik. Jika hal yang sebaliknya terjadi, maka masyarakat cenderung didominasi oleh satu model kekuasaan yang memusat atau authoritarian. *Ketiga*, pendemokrasian lebih

merupakan hasil proses difusi dibanding sebagai akibat pembangunan. Pengaruh lingkungan internasional seperti Inggris, dan Amerika, yang menjalankan usaha-usaha untuk mempengaruhi proses politik di negara lain, secara tidak langsung menyediakan model-model negara demokratik yang tangguh. *Keempat*, Huntington menguji hubungan antara agama dengan budaya politik, hasilnya dianggap bahwa agama protestan memiliki korelasi yang tinggi dengan demokratik; sementara Islam, Konfusianisme, Budhisme menyiapkan ladang subur untuk tumbuhnya pemerintahan autoritarian. (Huntington, dalam Suwarsono & Y. So, 1995).

Dari huraian komponen pra kondisi di atas ialah untuk menuju pendemokrasi pada berbagai aspek, termasuk bidang media massa, untuk mengimplementasikannya pada suatu kelompok maka proses pendemokrasi akan wujud dalam tiga model:

- 1) Model Linier, yaitu pendemokrasi yang muncul dimulai dari hak-hak sipil, kemudian berkembang pada hak-hak politik dan seterusnya berkembang pada kemampuan legislatif yang akhirnya pada berkembangnya hak memilih.
- 2) Model Siklus, yakni model yang menunjukkan adanya pergantian secara teratur dari munculnya demokratik dan *despotisme* (tirani). Elit masyarakat yang memegang kunci pengambilan keputusan politik menggunakan kekuatan militer untuk terus menerus mengadakan pemilihan umum tetapi tanpa pergantian kepemimpinan. Bentuk pemerintahan pada model ini mempunyai pola yang selalu berganti-ganti antara penguasa sipil dan militer.
- 3) Model Dialektis di mana masyarakat elit dan perkotaan yang semakin berkualiti mendesak kepentingan politiknya untuk berpartisipasi dan

pembagian kekuasaan kepada pemerintah autoritarian, sehingga dapat menumbuhkan perubahan yang bersifat radikal.

Berpijak dari ketiga model Huntington menganggap ada proses yang terbaik untuk tahapan pengembangan demokratik, bahwa demokratik cenderung merupakan hasil perjuangan dan perubahan bertahap dan perlahan-lahan, membutuhkan suatu konsolidasi atas kehendak bersama, tidak mungkin lahir demokratik dari suatu kekerasan atau sebuah revolusi. Kerana demokratik yang dicapai dengan cara kekerasan dan revolusi merupakan suatu agenda yang sifatnya dipaksakan dan cenderung untuk kepentingan kekuasaan sesaat, hanya sekadar menginginkan perubahan kekuasaan dan agenda tertentu, apakah itu agenda dari negara-negara Barat atau hanya sekadar tuntutan dari elit-elit yang memilik kepentingannya sendiri, Setelah revolusi berhasil justru akan menjadikan masyarakat suatu negara terjerumus ke dalam konflik dan perpecahan yang berkepanjangan antar etnis dan elit-elit serta kelompok-kelompok. seperti demokratik yang terjadi di Timur Tengah.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya revolusi dan kekerasan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, sebagaimana hipotesis Lord Acton seperti menemui kebenarannya; *power attends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*

Pendemokrasi yang wujud dan maju dalam suatu negara apabila ditopang oleh sistem media massa yang bebas, terbuka produk reformasi yang memungkinkan ide dan gagasan dalam politik. Kebebasan media massa semestinya mendorong demokratik dengan menstimulasi kepentingan hak-hak warga melalui suplai informasi yang cerdas dan kritis untuk menjaga akuntabilitas media massa.

Prinsip akuntabilitas media massa itu juga mencegah agar ruang publik

tersebut tidak diubah menjadi pasar(*market*), bila ruang publik disamakan dengan pasar, maka tidak akan ada ruang publik yang terpercaya. Idealnya dalam sistem media massa yang demokratis media massa berperan sebagai *market place ideas*, yaitu sebagai wadah tempat penyaluran aspirasi bagi warganegara sehingga dapat menyalurkan idea dan gagasan melalui media massa yang bebas.

PEMBAHASAN

1. Halangan Bagi Pendemokrasian Media Massa

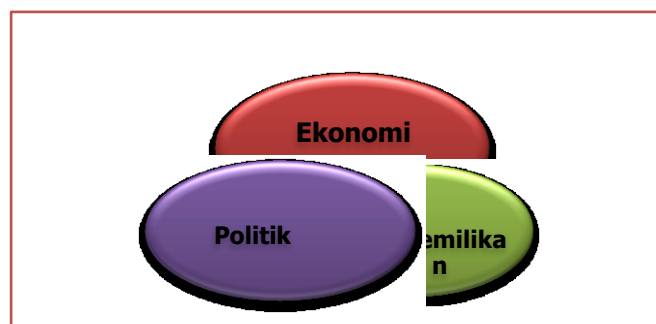
Menurut Doyle G. (2002). Dalam perkembangan media massa yang liberal dan globalisasi mencerminkan dominannya dunia struktur politis dan ekonomi, dan pemilik modal. Dalam era globalisasi informasi yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia muncul kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan media komunikasi yang lebih mementingkan aspek komersial. Ketidak-adilan media massa sebagai corong suara rakyat mendapat kecaman dari banyak kalangan.

Chomsky seperti dikutip oleh David Cogswell (2006), menyatakan bahwa media massa adalah sistem pasar yang dipimpin, disetir oleh profit dan dipandu oleh pemerintah, hal ini menandakan bahwa media massa tidak lagi netral. Pada era demokratis dan liberal seperti sekarang media massa penyiaran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan *civil society* yang harus dijamin kebebasannya, namun harus juga dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elite tertentu. Kekuatan media massa itu bisa mengooptasi, bahkan menghegemoni negara hingga masyarakat.

Hal inilah yang perlu dicermati secara kritis oleh para pendukung demokratis, termasuk para jurnalis. Jangan sampai kekuatan demokratis dibelokkan atas nama kebebasan media massa untuk kepentingan politik para kapitalis

penguasa media massa. Dalam masalah pendemokrasian sistem media massa keterbukaan akses juga ditentukan oleh hubungan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam media massa tergantung pada penerapan fasilitas baik ekonomi maupun politik. Dalam era globalisasi informasi yang melanda negara-negara di dunia, muncul kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan media massa lebih mementingkan aspek komersial aspek politik dan kepentingan pemilik modal. (Giddens. A. 1993. Peter Golding & Graham Murdock (2000), Kondisi ini dapat menjadi sebagai penghambat pendemokrasian sistem media massa, sebagaimana yang disajikan pada rajah berikut ini;

Tabel 2



(Dipetik daripada Peter Golding & Graham Murdock, 2000)

a. Politik

Dari aspek politik seringkali menjadi nilai pertimbangan bagi media massa, namun nilai tersebut tidak berhenti hanya sampai pada titik idealis saja, kerana acapkali berita-berita media massa bias kepentingan dan tidak netral. Sehingga ruang publik yang melekat dalam diri media massa perlu dikontrol oleh publik. Disinilah pandangan-pandangan tentang relasi media massa, birokrasi dan elit politik dalam ruang publik diuji. Fenomena ini menunjukkan betapa sebenarnya media massa sering mengesampingkan nilai-nilai pendemokrasian tentang pentingnya sebuah keterbukaan dalam komunikasi massa. (Oloyede, 2005).

Selama ini, media massa dipersepsikan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi negara dan kapital. Pada kenyataannya kekuatan media massaitu tidak pernah hadir kerana tereduksi oleh hegemoni negara dan dominasi kapital bahkan.Pemerintah yang sedang berkuasa umumnya memang lebih senang pada media massa penyiaran yang bergerak dikoridor hiburan dibanding dengan media massa penyiaran yang terlibat dibidang berita atau politik,alasannya dengan beralihnya konsentrasi masyarakat pada dunia hiburanPemilihan isu sekaligus dimaksudkan untuk mencermati tahap kritis fase pendemokrasian media massa pasca era 1980-an dimana media massa menjadi entitas bisnis transnasional (Wiliam L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, 2008).

b. Ekonomi

Media massa global umumnya memiliki karakteristik bersifat komersial adan harus menarik banyak khalayak. Kerana itu media massa tersebut berkolaborasi dengan pemasang iklan sebagai sumber kehidupan media massa tersebut. Jelas bahwa karakteristik dan orientasi media global dan komersial tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dari negara yang dilayaninya, maka muncul tuntutan untuk menilai kembali potensi media massa sebagai kepentingan publik.

Di Afrika Selatan, media massa menjadi satu pergerakan sosial setelah tumbangnya rezim apartheid, yang kemudian diikuti dengan proses pendemokrasian, desentralisasi dan penyesuaian struktural hingga tingkat tertentu. (Fraser & Estrada, 2001). Peter Golding dan Graham Murdock (2000), melihat bahwa ideologi kapitalisme telah meresap dalam institusi mediamassa, cenderung semakin menggurita dan menjangkau kemana-mana, tetapi kontrol kepemilikannya semakin terkonsentrasi hanya kepada beberapa elite.

"Media as a political and economic vehicle, tend to be controlled by conglomerates and media barons who are becoming fewer in number" (Peter Golding & Graham Murdock, 2000).

c. **Pemilik Media Massa**

Kepemilikan merupakan pengaruh ketiga pada media massa, yang tumpang tindih dengan dua sebelumnya, adalah konsentrasi kepemilikan media massa. Masing-masing pemilik perusahaan media massa yang besar dapat mempengaruhi konten secara langsung. Meskipun ada beberapa kasus yang terkenal manipulasi yang disengaja terhadap isi media massa dengan pemilik individu, pengaruh konsentrasi kepemilikan lebih sering dianggap tidak langsung, dan dikonseptualisasikan di tingkat organisasi (Shoemaker & Reese, 1996).

Menurut Kellner, Bagdikian (2000), mengatakan bahwa pemilik mediamassa mempengaruhi diversitas pesan yang diberikan media massa. Pemilik mediamassa selalu berusaha menguasai atau mendominasi pasar bukan hanya untuk satu medium tetapi semua mediamassa. Sependapat hal tersebut Giddens.A. (1993), sebagaimana dikutip Werner A pemilik perusahaan media massa tidak lagi memiliki tugas sosial untuk mensejahterakan masyarakat sebagai mana kapitalisme klasik, tetapi secara absolut untuk kepentingan mengakumulasi kapital perusahaan, media massa secara langsung atau tidak langsung dikontrol oleh kepentingan komersial, sehingga kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan kepemilikan tersebut dapat mempengaruhi terhadap jalannya pendemokrasian sistem media masa di Indonesia.

2. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga negara independen

di Indonesia, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan sistem media penyiaran di Indonesia. KPI hadir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) Pusat beranggotakan 9 orang, dan Komisi Penyiaran Daerah (KPI) Daerah beranggotakan 7 orang. Adapun pemilihannya melalui suatu tim seleksi dengan ujian kompetensi dan kelayakan. Kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui *fit and Profetest* untuk KPI Pusat dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan untuk pemilihan KPI Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya KPI dibantu oleh Sekretariat yang staf dan tenaganya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional non PNS yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendanaan dan administrasi. Sedangkan untuk anggaran operasional dan program kerja KPI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan KPI Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun kewenangan dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan dan menata sistem media penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlanggan (LPB).

Semangatnya adalah bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ruang publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor.24 Tahun 1997 "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan

bahwa penyiaran pada masa sebelumnya merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan wujud dari representasi masyarakat untuk mewedahi aspirasi masyarakat akan penyiaran. Lembaga ini menjadi suatu model yang berkembang pada negara-negara yang demokratis memiliki Otoritas yang terlepas dari pemerintah, dalam konsep negara yang demokratis peran pemerintah (*state*) semakin berkurang, sementara peran publik semakin besar.

Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus untuk mewakili publik yang berfungsi mewedahi aspirasi publik. Proses pendemokrasian di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Keranaa frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi sebagai pelayanan informasi publik yang sehat dan bermartabat. Kerana informasi yang disampaikan oleh media penyiaran terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Prinsip dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah yaitu prinsip keberagaman isi (*Diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*Diversity of Ownership*).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok sahaja. Prinsip ini pula

menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. (S.Sinansari Ecip, 2006:1). Maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2002 terjadi perubahan yang mendasar dan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, ikhwal intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata.Perubahan yang paling menjadi prioritas utama dalam semangat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tersebut adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam menjalankan fungsi, KPI mempunyai kewenangan menetapkan Standar Program Siaran (SPS), menyusun peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP), mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

KPI melakukan kordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.KPI mempunyaai tugas dan kewajiban, manjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu infrastruktur bidang penyiaran.Ikut membantu iklim persaingan yang tidak sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan kritik apresiasi masyaraakaat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran di Indonesia.

Belajar dari pada masa rejim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun, bahwa pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang

dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada rejim yang otoriter pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha. Semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Kerana tuntutan di alam pendemokrasian di Indonesia daerah memiliki hak otonomi untuk mengelola dan menata daerahnya masing, artinya perubahan juga terjadi dalam sistem ketata negaraan yang selama ini bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.

Daerah memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerah untuk kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli seperti yang terjadi pada era sebelum reformasi. Selain itu pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional membuat media massa lokal semakin terhimpit.

3. Nilai-Nilai Etika dan Moral.

Etika adalah pemikiran tentang moralitas, Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan

yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu perilaku etika berperan sebagai nilai-nilai dan moral pribadi seseorang dalam konteks sosial untuk menentukan suatu perilaku seseorang pantas atau tidak pantas.

Perilaku tidak etis atau suatu kepantasan merupakan cerminan perilaku menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Etika adapat beragam bentuk dari satu budaya ke budaya lainnya. Perilaku etis dan tidak etis bersifat subjektif dan mengundang perbedaan pendapat. Menurut Michael Josephson (Sungkawati, 2009) ada 10 prinsip untuk melihat perilaku etika, yaitu:

1. Tanggungjawab dan selalu memberi contoh,
2. Memiliki kompetensi tinggi,
3. Mentaati hukum dan aturan,
4. Hormat dan bersopan santun,
5. Kebersamaan, peduli dan toleransi
6. Berlaku adil dan berbudi luhur
7. Loyalitas, kesetiaan dan professional,
8. Komitmen dan menepati janji,
9. Integritas, memegang prinsip dan tulus
10. Kejujuran, berterus terang dan tidak berbohong.

Etika sesungguhnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Suseno 1987, ada 4 alasan mengapa etika semakin diperlukan, Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin plural, beragam dan bebas. Kedua, tidak hidup pada era modernisasi masyarakat yang tanpa tanding. Ketiga, tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita

alami dapat dimanfaatkan pelbagai pihak, Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama untuk menemukan kemantapan dalam iman kepercayaan. Etika adalah sesuatu yang merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau sesuatu tindakan yang baik dan buruk yang akan mempengaruhi pada hal nilai-nilai dan moral dalam konteks sosial yang menentukan.

Demokratisasi media penyiaran selalu dikaitkan dengan bagaimana untuk merelaisasikan dan mewujudkan kebebasan hak-hak masyarakat fundamental akan akses informasi yang baik dan benar, setelah reformasi tahun 1998 bergulir perkembangan media penyiaran tumbuh dan berkembang dengan cepat, media penyiaran tumbuh sebagai kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya, media seakan-akan tidak lagi sebagai *the four estate of democracy*, media penyiaran malah menjadi suatu industri yang dijadikan sebagai *capitaloriented* Demokrasi tidaknya suatu negara tidak cukup hanya dilihat dari sistim politiknya saja, Menurut (Henry, 2010) pentingnya perubahan sistem media penyiaran bagian dari demokratisasi. Untuk mendemokratisasikan masyarakat harus pula diikuti adanya upaya-upaya untuk merubah sistem media penyiaran.

KESIMPULAN

Reformasi tahun 1998 di Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat fundamental. Salah satu buah hasil dari reformasi tersebut yaitu di bidang Media massa, Selama lebih 32 tahun bahwa kebebasan media massa terpasung dan terkekang oleh kepentingan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Media massa dijadi sebagai corong kepentingan untuk menyampaikan informasi kepentingan kekuasaan. Sehingga informasi yang dietrima oleh masyarakat sering tidak akurat dan penuh kepalsuan dengan

pesan dan framing dari pemerintah yang berkuasa.

Hak eksklusif pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi media massa khususnya media penyiaran, karena dianggap sebaran informasi media penyiaran tidak mengenal batas dan wilayah dan dapat diterima dalam waktu yang bersamaan. Setelah reformasi tahun 1998 dan sejalan dengan tuntutan bidang penyiaran lahirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara yang independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud dari keterwakilan masyarakat akan penyiaran untuk menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang demokratik dengan prinsip-prinsip kebebasan, kebegaraman kepemilikan menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak, terpercaya serta pengetahuan.

Demokratisasi media penyiaran dan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tersebut semestinya KPI dapat memainkan peran yang amat besar dalam mendorong demokrasi dengan menstimulasi kepentingan hak-hak warga melalui suplai informasi yang cerdas dan kritis untuk menjaga akuntabilitas media penyiaran. Media Penyiaran yang menggunakan ranah publik agar tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan sebagai mencari keuntungan (*profit oriented*), namun demokratisasi tersebut tidak mengenyampingkan etika, budaya dimana media penyiaran itu berada. KPI sedianya diharapkan dapat menjadi pengawas dan wasit yang memiliki integritas dan tidak bermain diranah abu-abu dengan tidak keberdayaan melawan konglomerasi media yang semakin kuat menanamkan cenkramanya di ibu pertiwi. Jika demikian halnya bukan tidak mungkin wajah media penyiaran Indonesia kedepannya hanya menjadi agen dari sebuah produk modernisasi, liberalisme dan hidonisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agner Fog, 2004. *The supposed and the real rule of mass media in modern democracy*. Working paper.
- Agus Ngadino, (2010). Pergeseran Relasi Kuaas dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi. *Jurnal Simbur Cahaya* No 43. September 2010 ISSN 14110-0614. <http://eprints.unsri.ac.id> .
- Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Nik Yusri Musa, 2009, *Kebebasan media, Media Komunikasi, Perspektif Islam*. *Jurnal Hadhari* Bil. 2 (2009) 65-82.
- Arif Budiman, 2002, *Teori Negara-Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Jakarta - Indonesia
- Ab. Halim bin Tamuri & Zarin Bin Ismail, 2009. Hubungan Antara Pegangan Nilai Moral dengan Media Massa: Tinjauan ke atas Remaja Melayu Luar Bandar.
- Bagdikian, B.H. (2000). *The Media Monopoly (an eBook)*. Boston, MA: Beacon Press.
- Bungin, Burhan, 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Baker, C.E. (2000), *Media: Markets, and democracy*. Cambridge: New York: Cambridge University Press.
- Bealey, (2000), Menakar Demokrasi Di Indonesia, *Indeks Demokrasi Indonesia 2009* Bappenas, 2009:18.
- Chomsky, David Cogswell (2006: 80) Kapitalisasi Media dan Demokrasi, 12 Oktober 2010.*
- Dominick, Joseph R 1990, *The Dynamics of Mass Communication*, Third edition McGraw-Hill Publishing Company.
- Dahlgren, P, 2002, *Media, Deliberative Democracy and Civic Culture*. In *Search of the Talkative Public*, Vol 9 (2002), 3.5-26 Lund University.
- Doyle. G, (202), *Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and. Concentration in the UK and European Media*. London: Sage, 2002, 192pp. ISBN. www.leaonline.com/doi/pdf/10.1207/S15327736ME1604_5
- Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, 1956 (dalam, *Fours Theori Press*, 1986:8),
- Fraser, C. & Estrada, I. 2001. *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office.

- Giddens. A, 1993, "*New Rules of Sociological Method*" Cambridge: Polity Press.
- Golding, Peter & Murdoch, Graham, 1991., *Culture, Communications and Political Economy*, in James Curran and Michael Gurevitch, *Mass Media And Society*, Third Edition, Arnold London and Oxford University Press, New York.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.
- Henry B. Mayo, 2000, *Democracy : Theory and Practice*.
- Henry Subiyakto (2010). Konstestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca Oder Baru, Analisis Konstruksi Sosial, Relasi Negara, Industri Penyiaran dan Civin Society. Program Pascasarjana Desertas, Universitas Airlangga.
- Hong Thi Minnh, (2002), Medai and Civil Society in Support of good governance and democary in Vietnam, *Media Asia* 29 (1) 7:12
- Hodge. B.J., William P.A., dan Lawrence M.G., (2003). *Organization Theory*, Upper Saddle River, Prentice Hall
- Inglehart.R and Christian Welzel, *Modernization, Cultural Change and Democracy*. New York, Cambridge University Press, 2005. Kitley, 2003. *Television, Regulation and Civin Society in Asia*, London Routledge
- Jeff Heyes. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Bandung, Yayasan Obor.
- Kurniati Syam, Nia, 2006, *Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: Perspektif Teori Normative Media Massa*, *Jurnal Media Tour*. Vol.7 No. 1, Juni 2006
- Kellner, Douglas. (1990). *Contested Terrain and the Hegemony of Capital dalam Television and the Crisis of Democracy*. Boulder, CO: Westview Press.
- McQuail, Denis (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. Fifth Edition. London: SAGE Publications
- McChesney, Robert W., 2000, *Rich Media Poor Democracy, Communication Politics in Dubious Times*, The New Press, New York.

- Merkel, Wolfgang , 2010 *"Defektif Demokrasi"* dalam Christoph Shuck and Hadiwinata, Democracy in Indonesia; Yogyakarta-Graha Ilmu..
- Mulkan Dede, 2010, Kualitas Pemberitaan Media Terhadap Tingkat Pendidikan. Sebuah Analisis Kritis terhadap Kualitas Pemberitaan Media Massa Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidik. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung-Indonesia MP. Butarbutar. (2015), Hedonisme arus balik demokrasi. Persatuan Wartawan Indonesia bekerjasama dengan Hari Pers Nasional Pusat. PT. Semesta Rakyat Merdeka- Jakarta.
- Nadiah Abidin, 2009. Badan Regulator Penyiaran dalam Perspektif Hubungan Antara Negara , Pasar dan Masyarakat Madani: Sebuah studi kasus terhadap sejarah eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pendukung demokrasi ranah publik. <http://www.nova.pdf.com>. 5 Juni 2014
- Nawiroh Vega, 2010. Kekerasan Dalam Media Massa; Perspektif Kultivasi. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta-Indonesia. <http://www.academia.edu>. 15 Maret 2015
- Oloyede I. Bayo: *Press Freedom : A Conceptual Analysis*, Department Of Mass Communication, Moshood Abiola Polytechnic, Abeokuta, Ogun State, Nigeria, in Journal Kamla Raj, 2005 J. Soc.Sci, 11, (2), 101-109 (2005)
- Raboy Marc, 2002, *Media and Democratization in the Information Society*, in Jurnal Communication in the Information Society.
- Ritzer, George, 2013. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Penterjemah Alimandan (1-10). Rajawali Pers. Jakarta-Indonesia
- Rita Gani, 2007. Media Massa Dalam Masyarakat Madani. Jurnal Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 26/DIKTI/Kep/2005
- Rahmiatie, 2007. Peran dan Fungsi Radio Komunitas sebagai eskalasi demokratisasi komunikasi pada komunitas pedesaan di Jawa Barat, disertasi Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat-Indonesia.
- Restiana Kadarsih, 2008. Demokrasi Dalam Ruang Publik; Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa di Indonesia. Jurnal Dakwah Vol; IX No.1 Januari-Juni 2008. <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Schumpeter, J. A. (2005). *Kapitalismus, Sozialismus and Demokratie*.

Stuttgart:UTB.

- Siregar.A. 2000. Media Pers dan Negara : Keluar Dari Hegmoni. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol:4 Nomor 2, Nopember 2000 (171-196) ISSN 1410-4946 Universitas Gajah Mada Yogyakarta-Indonesia
- Severin, Werner, James W. Tankard Jr, 2005, *“Communication Theories*. Five Edition, Addison Wesley Longman Inc.Jakarta-Kencana.
- Sugeng, H. (2010). Dari Kekerasan Menuju Pemilihan: Resolusi Konflik dan Demokratisasi di Aceh. dalam Sugeng, H. dan Schuck, C. (eds.) *Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawati, The Role of Mass Communication in Culture Change and Society Behaviour, *In Journal Focus Ekonomi, vol 3, no.2 December 2008:44-55*
- Stiftung, F,E, 2008. Melawan Monopoli, Oligopoli dan Pemusatan Kepemilikan Media. *Jurnal Sosial Demokrasi*.Vol.3 No.1.Juli-September 2008. ISSN-1978-9084)
- Theodore Peterson William L. Rivers, & Jay W. Jensen, 2010. *Mass Media and Society Modern*, Prenada Media Group, Jakarta’
- Waluyo Djoko, 2011. *Membedah Otoriterian Pada Rezim Orde Baru. Pers di Masa Order Baru*. <http://publikasi.kominfo.go.id>
- William L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, 2008, *Mass Media and Modern Society*.2nd edition, Kencana Press – Jakarta.
- Zulfibriges,Teori Media Marxist: Sebuah Pengantar. *Jurnal Universitas Islam Bandung.-Indonesia, MEDIA TOUR Volume 4-1 tahun 2003. ISSN 1411-5883*
- Indeks Demokrasi di Indonesia <http://www.freedomhouse.org> tanggal 5 April 2014
- <http://yearrypanji.wordpress.com/2011/03/> tgl 20 Marc 201